

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sustainable Development Goals atau disebut dengan SDGs merupakan sebuah kesepakatan global yang diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 2015 di Rio de Janeiro, Brazil yang membahas tentang pembangunan berkelanjutan dan bertujuan untuk menanggulangi problematika pembangunan di berbagai negara.² SDGs dapat disebut dengan konsep terbaru yang merupakan evolusi dari *Millenium Development Goals* (MDGs) yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2000 dengan mempertahankan tujuan pembangunan berkelanjutan. Landasan utama SDGs juga tidak hanya pada pengentasan kemiskinan, melainkan menunjukkan sebuah transformasi paradigma yang mengutamakan keseimbangan antara aspek pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. SDGs mengembangkan aspek dari MDGs yang semula hanya 8 tujuan menjadi 17 tujuan dan 169 target dengan mengadopsi konsep Agenda 2030 yang menjadi panduan global bagi pihak swasta maupun negara, khususnya negara bagian dari PBB.³

Salah satu tujuan utama dalam kesepakatan SDGs adalah *Goals No. 1: No Poverty* yang berfokus pada penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya di dunia.⁴ Kemiskinan dipandang sebagai permasalahan makroekonomi yang memiliki kompleksitas struktural tinggi di negara negara

² Padmanathan Kasinathan, Rishi Pugazhendhi, and Rajvikram Madurai Elavarasan, "Realization of Sustainable Development Goals with Disruptive Technologies by Integrating Industry 5.0, Society 5.0, Smart Cities and Villages," *Sustainability, MDPI* 5, no. 15258 (2022): hal.1–31.

³ Helin Garlinia Yudhawisastra, *Pengembangan Sustainable Development Goals (SDGs)* (Bandung: Widina Media Utama, 2025). hal. 5

⁴ Ricky Rahmatullah, "Pengarusutamaan Sustainable Development Goals (SDGs) Program Pengentasan Kemiskinan Di Kota Pagar Alam," *Jurnal Tata Loka* 23, no. 2 (2021): hal. 238–51.

berkembang bahkan maju sekalipun. PBB menetapkan target Agenda 2030 untuk menurunkan atau bahkan menghapuskan kemiskinan hingga di angka 50% dari populasi dunia dihitung dalam proporsi laki laki, perempuan, dan remaja usia produktif. Target ini tentunya menjadi sasaran utama bagi negara negara yang terlibat dalam perumusan kesepakatan SDGs.⁵

Indonesia tergabung dalam Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 1950 dan menjadi anggota ke 60 pada saat itu. Indonesia juga merupakan salah satu anggota negara yang aktif dalam PBB, dan terlibat aktif dalam kerangka KTT Rio-20 di Brasil pada tahun 2012 dalam perumusan SDGs. Fokus utama SDGs adalah penghapusan masalah kemiskinan, dan permasalahan kemiskinan juga sangat krusial terutama di negara Indonesia. Merujuk pada data yang diunggah Badan Pusat Statistik Indonesia, prevalensi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan berjumlah 24,06 juta jiwa. Angka tersebut mengimplikasikan bahwa persentasi tingkat kemiskinan berada di angka 8,57% dari total populasi penduduk di Indonesia.⁶

Penentuan garis kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik sedikit berbeda dengan Bank Dunia. Garis kemiskinan yang ditentukan oleh BPS berdasarkan pada hitungan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan Bank Dunia menggunakan klasifikasi negara berdasarkan pendapatan perkapita. BPS menentukan pada tahun 2024 konsumsi minimum rumah tangga di angka Rp. 592, 242 perbulan.⁷ BPS dinilai lebih merepresentasikan tingkat kemiskinan karena berdasarkan pada pendataan di tingkat rumah tangga dengan pengeluaran untuk konsumsi kebutuhan hidup sebagai landasan perhitungan, sehingga dalam penelitian ini menggunakan data

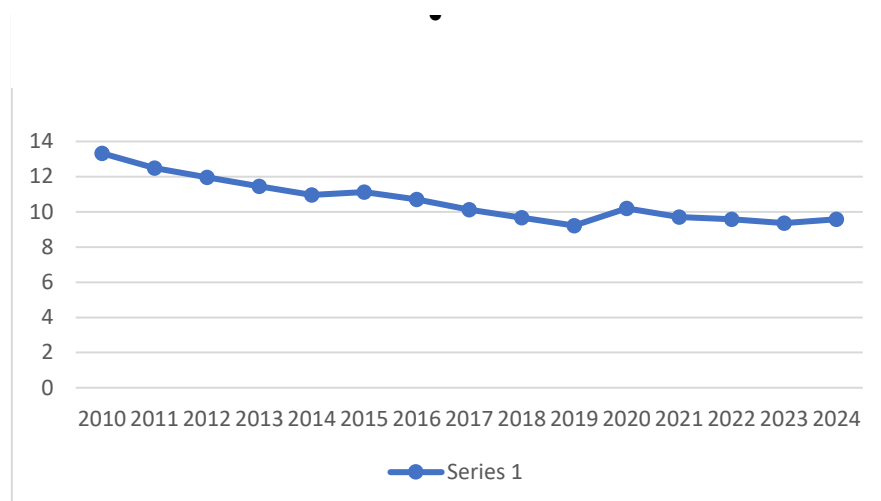
⁵ Wara Egha, Maya Hapsari, and Ria Angin, "Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Desa No 1 : Desa Tanpa Kemiskinan," *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan* 7, no. 2 (2025): hal.64–70.

⁶ Nanda Bhayu Pratama and Eko Priyo Purnomo, "Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Info Artikel," *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 6, no. 2 (2020): hal.64–74.

⁷ BPS, "Memahami Perbedaan Angka Kemiskinan Versi Bank Dunia Dan BPS," Badan Pusat Statistik, 2025, <https://www.bps.go.id/id/news/2025/05/02/702/memahami-perbedaan-angka-kemiskinan-versi-bank-dunia-dan-bps.html>.

yang bersumber dari BPS Nasional. Data tingkat kemiskinan nasional di Indonesia dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Tingkat Persentase Kemiskinan Indonesia tahun 2010 – 2024

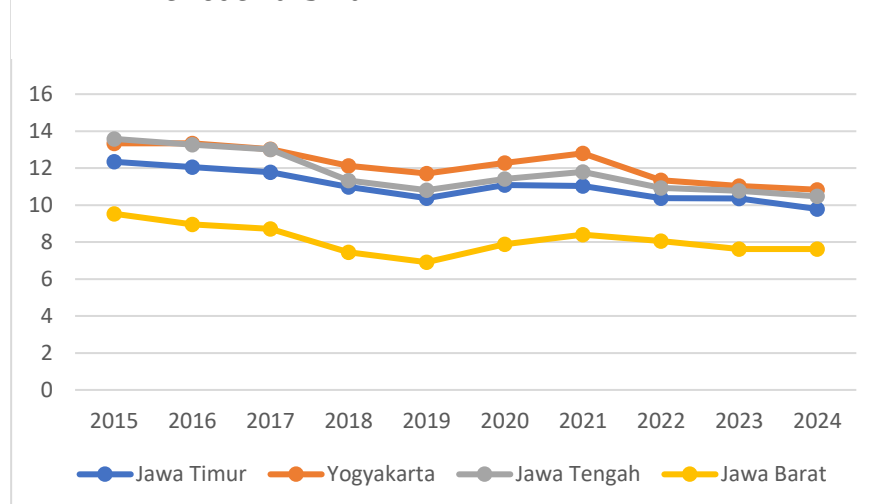


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami trend penurunan secara bertahap. Dalam rentang 10 tahun, Indonesia berhasil menurunkan tingkat kemiskinan hingga 35% dari total populasi. Hal ini membuktikan bahwa negara Indonesia serius dalam menghadapi permasalahan kemiskinan yang terus menjadi problematika krusial dari tahun ke tahun.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan persentase tingkat kemiskinan tinggi. Berdasarkan data yang bersumber dari BPS tahun 2024 persentase tingkat kemiskinan di provinsi DIY mencapai 10,83% dari populasinya. Angka yang tinggi hingga berada di atas rata rata persentase kemiskinan nasional yang pada 2024 berada di angka 8,57% dari total populasi. Persentase tersebut menempatkan provinsi DIY sebagai provinsi dengan persentase tingkat kemiskinan tertinggi di pulau Jawa, yang ditunjukkan dalam chart berikut:

Tabel 1.2 Tingkat Persentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa Periode 2015-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan grafik diatas, dapat diketahui bahwa persentase kemiskinan provinsi DIY menjadi yang teratas dalam periode 2015-2024 di pulau Jawa. Persentase penduduk miskin di DIY mengalami penurunan yang lamban, yaitu dari 13,34% pada tahun 2015 menjadi 10,83% pada tahun 2024 menunjukkan penurunan sebesar 2,51% dalam kurun waktu 10 tahun.⁸ Pada tahun 2024 populasi DIY sebesar 4.179.333 jiwa dan dapat disimpulkan pada tahun 2024 total penduduk miskin berjumlah 455 ribu jiwa, serta masuk dalam kategori 15 provinsi dengan total penduduk miskin terbanyak di Indonesia.⁹ Distribusi penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diproyeksikan melalui tabel berikut:.

⁸ BPS, “Statistik Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024” (DIY Yogyakarta, 2024).hal. 54

⁹ Adji G Rinepta, “Persentase Kemiskinan DIY Tertinggi Di Jawa, Ini Kata Pemda-DPRD,” Detik.com, 2024, <https://www.detik.com/jogja/bisnis/d-7420829/persentase-kemiskinan-diy-tertinggi-di-jawa-ini-kata-pemda-dprd>.diakses pada 27 November 2025 pukul 20.10 WIB

Tabel 1.3 Persentase Pesebaran Penduduk Miskin perKabupaten/Kota Provinsi DIY Tahun 2010-2024

Tahun	Kab. Kulon Progo	Kab. Gunung Kidul	Kab. Bantul	Kab. Sleman	Kota Yogyakarta	DI Yogyakarta
2010	23,15	22,05	16,09	10,7	9,75	15,63
2011	23,62	23,03	17,28	10,61	9,62	16,14
2012	23,32	22,72	16,97	10,44	9,38	15,88
2013	21,39	21,7	16,48	9,68	8,82	15,03
2014	20,64	20,83	15,89	9,5	8,67	14,55
2015	20,3	19,34	14,55	8,21	7,7	13,34
2016	20,3	19,34	14,55	8,21	7,7	13,34
2017	20,03	18,65	14,07	8,13	7,64	13,02
2018	18,3	17,12	13,43	7,65	6,98	12,13
2019	17,39	16,61	12,92	7,41	6,84	11,7
2020	18,01	17,07	13,5	8,12	7,27	12,28
2021	18,38	17,69	14,04	8,64	7,69	12,8
2022	16,39	15,86	12,27	7,74	6,62	11,34
2023	15,64	15,6	11,96	7,52	6,49	11,04
2024	15,62	15,18	11,66	7,46	6,26	10,83

Sumber : Badan Pusat Statiditik, 2024

Berdasarkan data dari tabel tersebut, wilayah provinsi DI Yogyakarta yang memiliki persentase penduduk miskin terbanyak adalah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2008 dengan persentase sebesar 28,85% dan turun secara signifikan di tahun 2024 menjadi 15,62%. Penyebab tingginya persentase penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo adalah mayoritas penduduknya masih bergantung pada alam dan bermata pencaharian sebagai petani. Kurangnya lapangan pekerjaan membuat Kabupaten Kulon Progo menjadi salah satu wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi.

Sedangkan daerah Kabupaten/Kota Provinsi DI Yogyakarta yang memiliki persentase terendah adalah Kota Yogyakarta. Selama sepuluh tahun berturut turut menjadi wilayah dengan persentase penduduk miskin terendah.

Penyebab rendahnya persentase penduduk miskin di Kota Yogyakarta dikarenakan wilayah tersebut adalah pusat kota Provinsi DI Yogyakarta dimana banyak sektor industrial dan pariwisata berada di wilayah tersebut.¹⁰ Banyaknya lapangan pekerjaan di Kota Yogyakarta membuat standar hidup wilayah tersebut naik hingga memiliki persentase penduduk miskin terendah di Provinsi DI Yogyakarta.

Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan ekonomi individu dalam memenuhi standar hidup layak. Pemenuhan kebutuhan seseorang bergantung pada partisipasi individu tersebut dalam pasar tenaga kerja guna mendapatkan pekerjaan dan memperoleh pendapatan yang ideal untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kegagalan individu tersebut dalam mencari pekerjaan menyebabkan terjadinya pengangguran yang secara inheren berdampak pada ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup.¹¹ Permasalahan pengangguran dalam ekonomi dipandang memiliki hubungan yang bersifat positif terhadap peningkatan angka kemiskinan. Apabila pengangguran tersebut meluas dalam suatu daerah, daya beli masyarakat daerah tersebut akan menurun akibat dari ketiadaan penghasilan.¹²

Berdasarkan teori dari Lundahl, kemiskinan dapat disebabkan oleh tingkat pengangguran melalui beberapa mekanisme. Pertama, apabila suatu rumah tangga dihadapkan pada batasan likuiditas (*liquidity constraints*) yang menyiratkan adanya ketergantungan erat antara konsumsi aktual dengan pendapatan yang diterima pada periode yang sama, maka insiden pengangguran akan secara langsung meningkatkan tingkat pendapatan orang miskin (*income poverty rate*) dan juga tingkat konsumsi orang miskin

¹⁰ Ayu Salsabilla, Indri Arrafi Juliannisa, and Nunuk Triwahyuningtyas, “Analisis Faktor-Faktor Kemiskinan Di Kabupaten / Kota Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Journal Ikkraith-Ekonomika* 5, no. 2 (2019): hal.96–105.

¹¹ Dini Anggraini and Muhammad Iqbal Fasa, “Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Untirta* 18, no. 1 (2023): hal.123–38.

¹² Salwa Syuja Putrizain et al., “Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten,” *Jurnal AMAL* 05, no. 01 (2023): hal.70–83.

(*consumption poverty rate*). Kedua, jika rumah tangga diasumsikan tidak menghadapi batasan likuiditas atau kondisi konsumsi saat ini relatif independen dari fluktuasi pendapatan saat ini, maka peningkatan pengangguran diprediksi hanya akan menyebabkan eskalasi kemiskinan yang signifikan dalam jangka panjang dan dengan dampak minimal pada periode jangka pendek.¹³

Pengangguran pada umumnya dipicu oleh disparitas antara laju pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan eskalasi jumlah angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas. Ketidakseimbangan ini menciptakan kondisi kelebihan penawaran tenaga kerja dibandingkan dengan kapasitas serap pasar kerja itu sendiri.¹⁴ Fenomena pengangguran merefleksikan adanya kesenjangan antara permintaan dan penawaran dalam mekanisme tenaga kerja. Pertumbuhan populasi yang pesat juga memperparah problematika ini, mengingat jumlah individu yang memasuki pasar kerja tidak diiringi dengan ekspansi sektor produktif yang proporsional.

Sejalan dengan teori pengangguran dapat menyebabkan kemiskinan, fluktuasi persentase tingkat pengangguran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bergerak mengikuti perubahan persentase tingkat kemiskinan. Pesebaran persentase pengangguran Provinsi DIY dapat disajikan dalam tabel berikut:

¹³ Chrisnatallya Sembiring, Vecky A.Jmasinambow, And Steeva Y.Ltumangkeng, “Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kota-Kota Provinsi Jawa Barat,” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 23, no. 2 (2023): hal.25–36.

¹⁴ Lidiya Rima Ranti, Dewi Yanti, and Yusawinur Barella, “Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Pontianak,” *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2024): hal.222–35.

Tabel 1.4 Persentase Tingkat Pengangguran perKabupaten/Kota Provinsi DIY Periode 2010-2024

Tahun	Kab. Kulon Progo	Kab. Gunung Kidul	Kab. Bantul	Kab. Sleman	Kota Yogyakarta	DI Yogyakarta
2010	4,18	4,04	5,24	7,17	7,41	5,69
2011	3,03	2,23	4,39	5,36	6,7	4,32
2012	3,04	1,38	3,7	5,64	5,33	3,86
2013	2,85	1,69	3,36	3,28	6,45	3,24
2014	2,68	1,61	2,57	4,21	6,35	3,33
2015	3,72	2,9	3	5,37	5,52	4,07
2016	2,81	2,9	2,4	6,05	5,4	5,61
2017	1,99	1,65	3,12	3,51	5,08	3,02
2018	1,49	2,07	2,72	4,4	6,22	3,35
2019	1,8	1,96	3,07	3,98	4,95	3,18
2020	3,71	2,16	4,06	5,09	9,16	4,57
2021	3,69	2,2	4,04	5,17	9,13	4,56
2022	2,8	2,08	3,97	4,78	7,18	4,06
2023	2,4	2,09	3,78	4,48	6,07	3,69
2024	2,01	2,16	3,62	4,13	5,8	3,48

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan tabel tersebut, persentase pengangguran di wilayah provinsi DI Yogyakarta mengalami penurunan yang signifikan di 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019 pengangguran naik 1,39% menjadi 4,57% di tahun 2020 yang sebelumnya mengalami fluktuasi yang tidak menentu. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi *covid-19* yang memaksa banyak perusahaan untuk melakukan pemberhentian hubungan kerja (PHK) secara massal. Namun, pengangguran secara simultan menurun dari tahun 2021 hingga 2024. Angka pengangguran yang semula 4,57% turun hingga 1,09% dalam kurun waktu empat tahun dan berhasil menyentuh angka 3,48% di tahun 2024.

Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta yang memiliki persentase pengangguran terbuka tertinggi adalah Kota Yogyakarta, dimana selama lima belas tahun berturut menduduki posisi pertama Kab/Kota Provinsi Yogyakarta yang memiliki persentase pengangguran tertinggi. Namun, pengangguran di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi dan telah menurun sejak tahun 2021. Pada tahun 2019 pengangguran 4,95% dan naik sebesar 4,82% menjadi 9,16% di akhir tahun 2021. Mengalami penurunan secara signifikan sampai di tahun 2024 menjadi 5,80%.

Sejalan dengan kemiskinan, dimana di tahun 2020 mengalami kenaikan disebabkan karena adanya pandemi *covid-19*. Kota Yogyakarta memiliki angka pengangguran tertinggi karena mayoritas penduduk Provinsi DI Yogyakarta berpusat disana. Jumlah penduduk yang besar dan mayoritas adalah mahasiswa menyebabkan angka pengangguran yang terbilang cukup besar. Tetapi kontribusi pemerintahan provinsi DI Yogyakarta yang tepat sasaran, membuat penurunan angka persentase pengangguran signifikan sejak empat tahun terakhir.¹⁵

Kualitas sumber daya manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia memiliki kontribusi signifikan dalam memitigasi tingkat pengangguran. Peningkatan kapasitas keterampilan dan kompetensi individu dipandang sebagai modal esensial bagi angkatan kerja untuk meningkatkan daya saing di pasar tenaga kerja. IPM yang tinggi juga dapat memberikan dorongan bagi seseorang untuk menciptakan usaha atau pekerjaan yang dapat menghidupi dia.¹⁶ Dengan penguasaan keterampilan yang relevan, angkatan

¹⁵ Wisang Seto Pangaribowo, “Pasca-Pandemi Covid-19 Angka Pengangguran Terbuka Di Kota Yogyakarta Masih Tinggi,” Kompas.com, 2024, <https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/08/15/193025078/pasca-pandemi-covid-19-angka-pengangguran-terbuka-di-kota-yogyakarta>.diakses pada 28 November 2025, 13.25 WIB

¹⁶ Inda Arfa Syera and Supiah Ningsih, “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Medan,” *Jurnal Senashtek* 2, no. 1 (2023): 397–402, <https://www.journals.stimsukmamedan.ac.id/index.php/senashtek2/article/download/695/479>.

kerja memiliki peluang yang lebih besar dalam mengakses lapangan pekerjaan yang layak. Perputaran ini akan menurunkan probabilitas terjadinya pengangguran friksional maupun struktural di masa mendatang.¹⁷

Indikator yang paling umum digunakan untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index* atau HDI). *Human Development Index* (HDI) yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) diakui sebagai salah satu instrumen pengukuran yang paling komprehensif sejak tahun 1990. HDI bertujuan sebagai indikator yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berdasar pada PDB, namun juga berdasar pada kualitas sumber daya manusia dan kemampuannya dalam bertahan hidup.

Rendahnya IPM juga berimplikasi langsung pada penurunan tingkat produktivitas, yang kemudian mengakibatkan minimnya pendapatan, sehingga mempersulit pemenuhan kebutuhan dasar. Kemiskinan dapat dipandang sebagai situasi yang serba terbatas (*deprivation*) yang terjadi bukan atas pilihan atau kehendak individu. Suatu populasi diklasifikasikan sebagai miskin jika ditandai oleh rendahnya capaian pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, dan gizi yang secara kolektif merefleksikan lingkaran setan ketidakberdayaan (*vicious cycle of poverty*). Keterbatasan ini semakin diperparah oleh akses dan kualitas SDM yang minim, baik melalui kanal pendidikan formal maupun informal.¹⁸

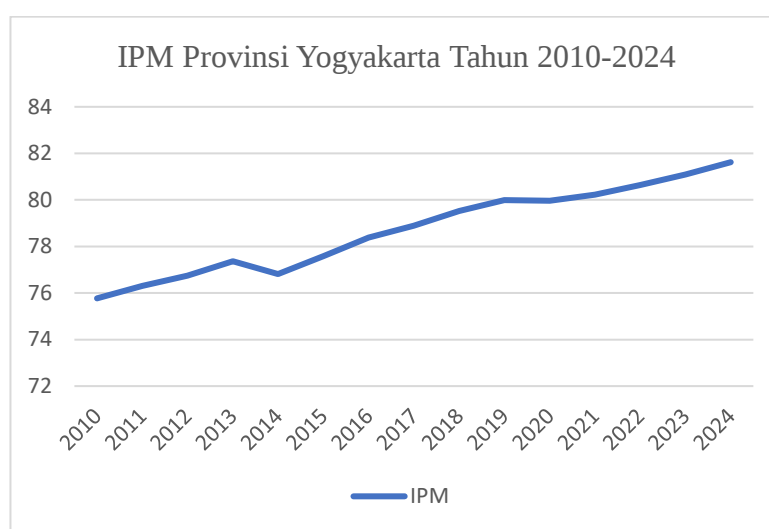
Berdasarkan teori dari Franciari yang menyebutkan bahwa kualitas sumber daya manusia sangat mempengaruhi produktivitas kerja. IPM merefleksikan seberapa besar akses masyarakat terhadap faktor pendidikan, kesehatan, dll. Semakin tinggi akses masyarakat ke bidang pendidikan akan

¹⁷ A N M Lumi et al., “Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota-Kota Provinsi Sulawesi Utara Analysis Of The Effect Of The Number Of Labor Force And Human Jurnal Emba Vol . 9 No . 3 Juli 2021 , Hal . 162 - 172,” *Jurnal EMBA* 9, no. 3 (2021): hal.162–72.

¹⁸ Democratia Kei et al., “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Kemiskinan Di Kabupatenminahasa,” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 24, no. 2 (2024): hal.133–45.

meningkatkan kreatifitas dan kemampun seseorang serta akan meningkatkan juga efektivitas kerja.¹⁹ Skala pengukuran IPM disimbolkan dengan angka, dimana apabila nilai IPM suatu daerah lebih dari 70 maka dapat dikatakan wilayah tersebut memiliki kualitas sumber daya manusia tinggi.²⁰ Seperti di Provinsi Daerah Isimewa Yogyakarta yang konsisten meraih IPM tinggi sejak tahun 2010, dapat ditunjukkan dalam gambar berikut :

Tabel 1.5 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DIY Tahun 2010-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DIY, 2024

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan yang signifikan nilai IPM di Provinsi DIY. Pada tahun 2010, IPM Provinsi DIY menyentuh 75,77 yang termasuk kedalam kategori IPM Tinggi pada masa itu hingga sekarang. Pada tahun 2024, IPM Provinsi DIY tembus di angka 81,62 dan masuk kedalam kategori IPM sangat tinggi. Namun, peningkatan IPM ini berbanding terbalik dengan fluktuasi tingkat kemiskinan di Provinsi Yogyakarta khususnya pada tahun 2010-2024, sehingga terdapat kesenjangan terhadap teori IPM.

¹⁹ Muhamad Paizal, Sahrul, and U. Sulia Sukmawati, "Analisis Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Kemiskinan Di Kalimantan Barat," *Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 2 (2021): hal.41–51.

²⁰ BPS, "Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru," 2014.hal. 4

Sejak diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM telah mendapatkan berbagai kritik di kalangan akademisi. Seperti pada tahun 1991, McGilivray menyampaikan kritik yang mempertanyakan komposisi serta validitas penggunaan komponen IPM (kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran perkapita) sebagai instrumen pembangunan antar negara. Pada tahun 1997 kritik yang dikemukakan Hicks muncul yang menyarankan integrasi koefisien gini untuk mengakomodasi aspek ketimpangan dalam perhitungan indeks pembangunan manusia. Streeten pada tahun 2000 juga ikut mempertanyakan signifikansi pembobotan ketiga komponen IPM, serta mengkritik pengabaian indikator indikator seperti hak asasi manusia, otonomi individu, kemandirian, kelestarian lingkungan, dan lain lain.²¹

Pada tahun 2000, para pemikir ekonomi islam merumuskan sebuah konsep pembangunan guna merespon terhadap keterbatasan IPM yang bersifat reduksionis karena dinilai gagal dalam mengintegrasikan dimensi moral dan perspektif sosial ekonomi islam yang krusial bagi negara negara berpenduduk mayoritas Muslim. Konsep tersebut adalah Islamic Human Development Index atau I-HDI yang konseptualisasinya dirumuskan oleh Chapra. Beliau berpijak pada prinsip Maqashid al-Syariah yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali dengan kerangka yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²²

Konsep tersebut dikembangkan oleh Hasan pada tahun 2006 yang menegaskan bahwa pembangunan dalam paradigma Islam bersifat integral, yang mensyaratkan keseimbangan antara kebutuhan material dan moral manusia guna memenuhi kebutuhan hidup demi mencapai kesejahteraan. I-HDI dirancang melalui proses adaptasi dan penyesuaian yang ketat terhadap

²¹ Hendrie Anto, "Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries," *Islamic Economic Studies* 19, no. 69–94 (2009), hal. 74

²² *Ibid.*, hal. 75

konsep ajaran agama Islam, sehingga dianggap lebih representatif dan sesuai untuk diimplementasikan di negara-negara berpenduduk Muslim maupun di negara-negara non-Muslim.²³

Konsep pengukuran Indeks Pembangunan Manusia Islami (I-HDI), sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda yaitu berakar kuat pada kerangka *Maqāṣid Syariah*. Konsep ini menegaskan bahwa kebutuhan dasar fundamental manusia tersusun atas lima aspek esensial (*al-darūriyyat al-khams*) yang merujuk pada agama (*din*), jiwa (*nafs*), intelektual (*'aql*), keluarga dan keturunan (*nasl*), serta harta (*māl*). Kelima dimensi ini dipandang sebagai kebutuhan primer (*darūriyyāt*) dalam perspektif Islam, yang kegagalannya dalam pemenuhan akan menghalangi pencapaian kebahagiaan hidup dan kesejahteraan paripurna (*falāḥ*) bagi individu.²⁴

Indikator yang digunakan untuk menghitung *Islamic Human Development Index* (I-HDI) berdasar pada teori perhitungan I-HDI oleh Andriani Syofyan dengan indikator perwakilan di setiap dimensi kelima unsur.²⁵ Menurut teori dari Anto tentang indikator yang mewakili dimensi *Islamic Human Development Index* (I-HDI) dapat ditunjukkan tabel 4 dibawah ini.²⁶

²³ Tika Widiastuti, "The Nexus between Islamic Social Finance, Quality of Human Resource, Governance, and Poverty," *PubMed Central* 8, no. 12 (2022): hal. 212

²⁴ Kity Aiu Viollani and Eko Suprayitno, "Pengaruh Islamic Human Development Index Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Dengan Pengangguran Sebagai Variabel Intervening," *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 11 (2022): hal.5233–44.

²⁵ Andriani Syofyan, "Analisis Islamic Human Development Indeks(I-HDI) Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2022," *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2024): hal.1394–1407.

²⁶ Anto, "Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries."hal.79

Tabel 1.6 Indikator yang Mewakili I-HDI

No.	Dimensi	Indikator Pembangunan yang Mewakili
1	Agama (<i>dien</i>)	Indeks Kriminalitas (<i>crime index</i>)
2	Keturunan dan Keluarga (<i>nasl</i>)	Laju Pertumbuhan Penduduk
3	Harta Material (<i>maal</i>)	Angka Kedalaman Kemiskinan, dan Pengeluaran Perkapita
4	Kepintaran (<i>'aql</i>)	Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata Rata Lama Sekolah
5	Jiwa (<i>nafs</i>)	Tingkat Harapan Hidup (<i>life expetancy index</i>)

Sumber: Hendrie Anto, 2009

Berdasarkan penjelasan tabel tersebut, terdapat sebuah keterbaruan dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia. Sebelumnya, IPM dilandaskan pada Usia Harapan Hidup (UHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata Rata Lama Sekolah (RLS) dan pendapatan perkapita. Pada tahun 2010 terdapat perbaruan yang mengganti indikator AMH menjadi Harapan Lama Sekolah (HLS), dan pendapatan perkapita diganti menjadi Pengeluaran Perkapita.²⁷ Sehingga indikator I-HDI di Provinsi DIY dapat disesuaikan dan disajikan pada tabel berikut:

²⁷ BPS, “Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru” (Jakarta, 2015), <https://searchengine.web.bps.go.id/filemenu/Booklet-IPM-Metode-Baru.pdf>.

Tabel 1.7 Tingkat Indikator I-HDI Provinsi DIY Periode 2010-2024

Tahun	Angka Kriminalitas	Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata Rata Lama Sekolah	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Pengeluaran Perkapita (Rp)
2010	17,622	73,22	14,15	8,53	1,03	18,465
2011	6,326	73,27	14,61	8,55	1,23	20,838
2012	8,897	73,32	14,64	8,62	1,23	24,236
2013	6,727	73,62	14,67	8,63	1,22	25,523
2014	7,135	74,5	14,85	8,85	1,2	24,943
2015	7.195	74,72	15,03	9,02	1,19	12,684
2016	6.766	74,73	15,23	9,14	1,13	13,229
2017	5.194	74,76	15,42	9,24	1,11	13,521
2018	4.630	74,84	15,56	9,33	1,08	13,946
2019	3.453	74,92	15,58	9,38	1,05	14,394
2020	4.694	74,99	15,59	9,55	0,58	14,015
2021	5.331	75,04	15,64	9,64	0,7	14,111
2022	5.166	75,08	15,65	9,75	0,69	14,482
2023	5.193	75,12	15,66	9,83	0,67	14,924
2024	4.795	75,36	15,7	9,92	0,66	15,361

Sumber : Badan Pusat Statistik, dan BAPPERIDA Provinsi DIY,2024

Berdasarkan tabel diatas, Indikator *Islamic Human Development Index* (I-HDI), seperti angka kriminalitas, angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata rata lama sekolah, laju pertumbuhan penduduk, pengeluaran perkapita, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks gini ratio provinsi DI Yogyakarta dari tahun 2010 hingga 2024 mengalami penurunan dan kenaikan yang tidak terlalu signifikan. Indikator yang mengalami kenaikan di provinsi DI Yogyakarta dalam periode 2010-2024 adalah angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata rata lama sekolah, dan indeks kedalaman kemiskinan (sempat menurun di tahun 2022 -2023)

Indikator yang mengalami penurunan adalah angka kriminalitas (sempat naik signifikan di tahun 2019-2023), laju pertumbuhan penduduk (sempat naik signifikan di tahun 2019), pengeluaran perkapita, dan indeks gini.²⁸ Apabila dibandingkan dengan tabel persentase penduduk miskin, maka indikator yang mengalami penurunan berbanding lurus signifikan dengan kemiskinan. Sedangkan indikator yang mengalami kenaikan berbanding terbalik dengan kemiskinan.²⁹

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat pengangguran suatu wilayah bersumber dari intervensi kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan Upah Minimum. Penetapan upah minimum yang terlalu jauh melampaui keseimbangan di pasar tenaga kerja akan membebani biaya produksi perusahaan sektor industri. Kondisi ini memicu kebijakan rasionalisasi tenaga kerja oleh perusahaan yang mengarah pada pengurangan tenaga kerja sebagai upaya pengurangan beban biaya tambahan. Fenomena tersebut akan berdampak pada kenaikan pengangguran di wilayah tersebut.³⁰

Upah merepresentasikan imbalan finansial yang diberikan sebagai kompensasi atas output kerja yang telah diselesaikan. Perubahan pada tingkat upah, baik berupa penurunan maupun stagnasi, memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan individu.³¹ Upah minimum adalah upah bulanan terendah, yang terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, dan ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*). Penetapan upah

²⁸ Bapperida, "Jogja Dataku : Untuk Pembangunan Yang Lebih Baik," Bapperida, 2022, <https://bapperida.jogjapro.go.id/dataku/>.diakses pada 27 Desember 2025, Pukul 21:35 WIB

²⁹ ahmad Alfian Syahrul Munir, "Pengaruh Islamic Human Development Index (I-Hdi) Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Dengan Pengangguran Sebagai Variabel Intervening" (UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025).hal.20

³⁰ Mitha Rachma Oktavia, "Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Di Indonesia," *Journal Ecodemica* 5, no. 2 (2021): hal.94–102.

³¹ Natasya Anggraini, Purbayu Budi Santosa, and Putri Rizka Citaningati, "Pengaruh Islamic Human Development Index , Pengangguran , Ketimpangan Pendapatan , Dan Upah Minimum Kabupaten Terhadap Kemiskinan (Studi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2009-2022)" 10, no. 03 (2024): hal.3143–53.

minimum didasarkan pada analisis kondisi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kondisi ketenagakerjaan di wilayah bersangkutan, serta tidak lagi didasarkan pada Standar Hidup Layak.³²

Pengangguran yang diakibatkan kekakuan upah timbul dari ketidaksesuaian antara volume pekerja yang mencari pekerjaan dan kuantitas pekerjaan yang tersedia. Secara teoretis, peningkatan tingkat upah akan mendorong penawaran tenaga kerja meningkat, namun pada saat yang sama permintaan tenaga kerja cenderung berkurang. Kondisi ini mengarah pada terciptanya surplus tenaga kerja atau pengangguran. Faktor faktor yang mendasari kekakuan upah meliputi: regulasi upah minimum, pengaruh serikat pekerja, dan prinsip efisiensi upah.³³

Provinsi Daerah Keistimewaan Yogyakarta termasuk kedalam wilayah dengan Upah Minimum terendah di Indonesia. Salah satu penyebab yang menjadi faktor utama adalah keterbatasan lapangan pekerjaan. Kurangnya lapangan pekerjaan tersebut berkemungkinan bersumber dari sedikitnya industri yang beroperasi di wilayah tersebut. Berbeda dengan wilayah tetangganya, jumlah industri di Provinsi DIY sangat sedikit dan dinilai kurang mampu untuk menyerap tenaga kerja secara maksimal.³⁴ Data upah minimum perkabupaten/kota Provinsi DIY dapat disajikan pada tabel berikut:

³² Ady Thea, "Aturan Upah Minimum Dalam UU Cipta Kerja Terbaru, Begini Penjelasannya," Hukum Online, 2023, https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-upah-minimum-dalam-uu-cipta-kerja-terbaru--begini-penjelasannya-lt64e34fbeddd4f?utm_source=copy&utm_medium=berita&utm_campaign=shared_sosmed. diakses pada 25 Desember 2025, Pukul 20.00 WIB

³³ Ahmad Alfian Syahrul Munir, "Pengaruh Islamic Human Development Index (I-Hdi) Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Dengan Pengangguran Sebagai Variabel INTERVENING" (UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025). hal.24

³⁴ Choiriyah Indriyati Putri, "Kenapa UMR Jogja Rendah? Ternyata Ini Alasannya," Inilah.com, 2024, <https://www.inilah.com/alasan-mengapa-umr-jogja-rendah>.diakses pada 29 Desember 2025, pukul 22.00 WIB

Tabel 1.8 Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi DIY Periode 2010-2024

Tahun	Kab. Kulon Progo	Kab. Gunung Kidul	Kab. Bantul	Kab. Sleman	Kota Yogyakarta	DI Yogyakarta
2010	745.694	745.694	745.694	745.694	745.694	745.694
2011	808.000	808.000	808.000	808.000	808.000	808.000
2012	892.660	892.660	892.660	892.660	892.660	892.660
2013	954.339	947.114	993.484	1.026.181	1.065.247	947.114
2014	1.069.000	988.500	1.125.500	1.127.000	1.173.300	988.500
2015	1.138.000	1.108.249	1.163.800	1.200.000	1.302.500	988.500
2016	1.269.870	1.235.700	1.297.700	1.338.000	1.452.400	1.182.510
2017	1.373.600	1.337.650	1.404.760	1.448.385	1.572.200	1.337.645
2018	1.493.250	1.454.200	1.572.150	1.574.550	1.709.150	1.454.154
2019	1,613,200	1.571.000	1.649.800	1.701.000	1.848.400	1.570.923
2020	1.750.500	1.705.000	1.790.500	1.846.000	2.004.000	1.704.608
2021	1.805.000	1.770.000	1.842.460	1.903.500	2.069.530	1.765.000
2022	1.904.275	1.900.000	1.916.848	2.001.000	2.153.970	1.840.916
2023	2.050.447	2.049.266	2.066.439	2.159.519	1.981.782	1.981.782
2024	2.207.737	2.188.041	2.216.463	2.315.976	2.492.997	2.125.898

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan tabel tersebut, upah minimum provinsi DI Yogyakarta mengalami kenaikan tinggi dari tahun 2010 hingga tahun 2024. Tahun 2010-2012 UMK yang ditetapkan berdasarkan pada besaran UMP pada wilayah yang bersangkutan, sehingga tidak ada perbedaan besaran. Pada tahun 2013 UMP DI Yogyakarta sebesar Rp. 947.114 dan naik hingga 124,46% di tahun 2024 menjadi Rp. 2.125.898. Jika dibandingkan dengan tabel kemiskinan, maka UMP berbanding terbalik dengan kemiskinan di rentang tahun 2019 hingga 2024 yang sebagian besar disebabkan oleh kenaikan inflasi.

Berdasarkan tabel UMK tersebut, dapat diketahui bahwa daerah Kab/Kota provinsi DI Yogyakarta yang memiliki UMK terendah adalah Kabupaten Gunung Kidul di sepuluh tahun terakhir. Pada tahun 2013 UMK Kab. Gunung Kidul tembus di angka Rp. 947.114 terendah dalam 12 tahun

terakhir yang disebabkan karena persebaran sektor industri yang lebih sedikit daripada daerah lain, dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.³⁵ Namun, UMK Gunung Kidul mengalami kenaikan yang signifikan hingga tahun 2024 menjadi Rp. 2.188.041.

Wilayah yang memiliki UMK tertinggi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta adalah Kota Yogyakarta. Dalam periode 2013-2024, Kota Yogyakarta tetap menjadi wilayah dengan UMK tertinggi. Pusat kota dari Provinsi DI Yogyakarta menjadikan sebuah Kota Yogyakarta termasuk kedalam wilayah metropolitan dibanding Kab/Kota yang lain di wilayah Provinsi DI Yogyakarta. Hingga puncaknya di tahun 2024 UMK Kota Yogyakarta hampir menyentuh 2,5Juta atau sebesar Rp. 2.492.997. Jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran UMK Kota Yogyakarta berbanding lurus, sehingga upah minimum memiliki pengaruh terhadap pengangguran.

Variabel lain yang signifikan berhubungan dengan tingkat pengangguran adalah ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan merefleksikan kesenjangan ekonomi yang lebar antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah dalam suatu wilayah. Fluktuasi kesenjangan pendapatan mengartikan distribusi kekayaan yang tidak merata atau hanya terkonsentrasi pada beberapa pihak. Kondisi ini secara struktural dapat membatasi aksesibilitas masyarakat dengan level pendapatan menengah kebawah terhadap peluang ekonomi dan penguatan kapasitas SDM yang akhirnya memperburuk risiko pengangguran.³⁶

³⁵ Markus Yuwono`, “Gunungkidul UMK Terendah Se-DIY, Separuh Pengusaha Kesulitan Bayar Upah,” Kompas.com, 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/11/24/081435178/gunungkidul-umk-terendah-se-diy-separuh-pengusaha-kesulitan-bayar-upah>. diakses pada 28 November 2025 pukul 11.00 WIB

³⁶ Muhammad Ersad Saerendra, Moh Mukhsin, and Mohamad Ainun Najib, “Pengaruh Indeks Zakat Nasional, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum, Pengangguran Terbuka Dan Rasio Gini Terhadap Kemiskinan(Studi Kasus Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Banten Tahun 2019-2024),” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 204 (2025): hal. 1463–85.

Berdasarkan teori dari Rubens Penha Cysne yang menyatakan bahwa adanya korelasi positif yang signifikan antara ketimpangan pendapatan dengan tingkat pengangguran.³⁷ Hubungan kausal ini memberikan implikasi bahwa ketika ketimpangan pendapatan berada pada level yang tinggi, maka akan menciptakan dinding kesenjangan yang kompleks. Perbedaan fasilitas dari pemerintah, hingga terbatasnya peluang masyarakat dengan pendapatan rendah dalam jangka panjang akan memperburuk pengangguran. Ketimpangan pendapatan yang tinggi juga dapat memaksa para masyarakat yang tinggal di wilayah pendapatan rendah untuk migrasi ke wilayah perkotaan dengan harapan peningkatan taraf hidup. Apabila terjadi kegagalan berkemungkinan besar untuk menambah tingkat pengangguran di wilayah tersebut.³⁸

Ketimpangan pendapatan juga secara signifikan dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Berdasarkan teori dari Felix Naschold, upaya pemerintah dalam memitigasi ketimpangan pendapatan melalui kebijakan fiskal agresif yang mengarah pada peningkatan pajak pada masyarakat berpendapatan tinggi akan berisiko mendorong insentif investasi dalam jangka panjang. Dampak sistemik dari kontraksi investasi ini meluas hingga ke sektor keuangan publik, sehingga dapat membatasi ketersediaan likuiditas dan akses kredit bagi masyarakat berpenghasilan rendah.³⁹

Pembatasan modal, fasilitas, dan peluang ekonomi tersebut menciptakan hambatan struktural yang menghalangi perkembangan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Akibat jangka panjang dari ketidakmampuan instrumen kebijakan pemerintah dalam menanggulangi ketimpangan tidak hanya akan meningkatkan angka kemiskinan, tetapi juga menurunkan tingkat kualitas SDM akibat dari terbatasnya aksesibilitas.⁴⁰ Dalam studi ekonomi, indikator kuantitatif utama yang secara universal digunakan untuk mengukur derajat

³⁷ Rubens Penha Cysne, "On the Positive Correlation Between Income Inequality and Unemployment," *EPGE* 561, no. 1 (2004): hal. 1–14.

³⁸ *Ibid.*, hal. 1-14

³⁹ Felix Naschold, "Why Inequality Matters for Poverty," *Briefing Paper* 2, no. 2 (2002): hal. 1–6.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 1-6

ketidaksetaraan distribusi pendapatan adalah *Gini Ratio* (Rasio Gini) dengan skala perhitungan <1 atau angka gini rasio dibawah 1 dianggap normal.⁴¹

Pada tahun 2024, Provinsi DIY menempati posisi pertama di Negara Indonesia sebagai wilayah dengan ketimpangan pendapatan tertinggi berdasarkan gini rasio. Data dari BPS menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di wilayah DIY jauh melebihi tingkat ketimpangan pendapatan nasional. Angka gini rasio Provinsi DIY pada tahun 2024 adalah 0,435, dan indeks gini rasio Indonesia adalah 0,381.42 Persebaran gini rasio Provinsi DIY dapat disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 1.9 Tingkat Rasio Gini perKabupaten/Kota Provinsi DIY
Periode 2010-2024**

Tahun	Kab. Kulon Progo	Kab. Bantul	Kab. Gunung Kidul	Kab. Sleman	Kota Yogyakarta	DI Yogyakarta
2010	0,266	0,324	0,274	0,375	0,368	0,439
2011	0,388	0,376	0,34	0,417	0,384	0,419
2012	0,417	0,405	0,368	0,465	0,37	0,433
2013	0,313	0,33	0,266	0,387	0,454	0,42
2014	0,382	0,321	0,296	0,412	0,396	0,389
2015	0,367	0,376	0,319	0,446	0,446	0,433
2016	0,372	0,397	0,334	0,394	0,429	0,42
2017	0,392	0,413	0,34	0,406	0,446	0,432
2018	0,365	0,448	0,337	0,425	0,42	0,441
2019	0,359	0,422	0,325	0,417	0,371	0,423
2020	0,379	0,418	0,352	0,42	0,421	0,434
2021	0,367	0,441	0,323	0,425	0,464	0,441
2022	0,38	0,41	0,316	0,418	0,519	0,439
2023	0,402	0,454	0,343	0,433	0,454	0,449
2024	0,373	0,417	0,355	0,431	0,449	0,435

⁴¹ Anggraini, Santosa, and Citaningati, “*Pengaruh Islamic Human Development Index , Pengangguran , Ketimpangan Pendapatan , Dan Upah Minimum Kabupaten Terhadap Kemiskinan (Studi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2009-2022)*.”

⁴² M Nursyamsi, “Data BPS: Yogyakarta Jadi Provinsi Dengan Ketimpangan Tertinggi,” *Republika*, 2024. diakses pada 29 Desember 2025 Pukul 22.13 WIB

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan dari data tersebut, angka indeks gini rasio kabupaten/kota Provinsi DIY hampir mendekati bahkan ada yang melebihi indeks gini nasional. Wilayah dengan indeks gini terendah adalah Kota Yogyakarta dikarenakan pada masa itu provinsi DIY masih dalam keadaan stabil. Tahun 2014 mulai menunjukkan perubahan yang signifikan, dimana Kabupaten Gunung Kidul menjadi wilayah dengan indeks gini terendah hingga tahun 2024. Selama periode 2014 hingga 2024 Kabupaten Gunung Kidul konsisten menjadi wilayah dengan ketimpangan terendah, walaupun sempat terjadi fluktuasi di tahun 2024 hingga di angka 0,355. Penyebab wilayah tersebut menjadi wilayah dengan indeks gini terendah adalah karena wilayah tersebut mayoritas penduduknya masih bergantung pada alam dan bermata pencaharian sebagai petani, serta minimnya sektor industrial di wilayah tersebut. Pola konsumsi rumah tangga di wilayah Kab. Gunung Kidul juga belum sepenuhnya pulih akibat musibah *covid-19*.⁴³

Sedangkan, wilayah dengan ketimpangan pendapatan tertinggi adalah Kota Yogyakarta walaupun di tahun 2010 hingga 2013 Kabupaten Kulon Progo menempati posisi pertama sebagai wilayah dengan indeks gini tertinggi dengan perbedaan tipis. Tahun 2014-2024 Kota Yogyakarta konsisten menempati posisi tertinggi dengan dengan angka tertingginya di titik 0,519 di tahun 2022. Angka yang sangat tinggi hingga jauh melebihi indeks gini nasional, dan menempati posisi wilayah dengan ketimpangan pendapatan tertinggi di Indonesia pada tahun 2022. Peningkatan indeks gini ini sejalan dengan meningkatnya angka pengangguran di Provinsi Yogyakarta, khususnya Kota Yogyakarta.

Penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Natasya Anggraini dengan judul *“Pengaruh Islamic Human Development Index, Pengangguran, Ketimpangan Pendapatan, dan Upah Minimum Kabupaten Terhadap Kemiskinan (Studi di*

⁴³ Diskominfo, “Analisis Gini Ratio Kota Yogyakarta Pada Tahun 2023,”
Diskominfo Kota Jogja, 2023.hal. 35

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2009-2022) membahas tentang faktor faktor yang menyebabkan kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta pada rentang tahun 2009-2022.⁴⁴ Namun dalam penelitian tersebut hasil menunjukkan bahwa I-HDI tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan dengan menggunakan metode regresi berganda. Peneliti ingin mencoba meneliti kembali indikator I-HDI, Upah Minimum, dan Gini Rasio memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di provinsi DI Yogyakarta dengan menggunakan indikator pengangguran sebagai variabel mediasi. Variabel Pengangguran diduga dapat memediasi variabel I-HDI, Upah Minimum, dan Gini Rasio dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Keistimewaan Yogyakarta khususnya dalam rentang Periode 2010-2024. Penelitian saya menggunakan teknik yang berbeda dengan penelitian tersebut, yaitu menggunakan teknik uji *path analysis* dengan uji Sobel untuk menguji variabel mediasinya dan menggunakan alat analisis berupa Eviews.

Penelitian dengan model yang sama sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Ahmad Alvian Syahrul Munir dengan judul "*Pengaruh Islamic Human Development Index (I-Hdi) Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Dengan Pengangguran Sebagai Variabel Intervening*". Penelitian tersebut membahas tentang pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel I-HDI dan Upah Minimum dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur melalui variabel Pengangguran sebagai variabel Mediasi. Penelitian tersebut menggunakan metode *path analysis* dan uji Sobel untuk menguji variabel Mediasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel pengangguran tidak memediasi secara signifikan variabel I-HDI dan Upah Minimum di Provinsi Jawa Timur.⁴⁵ Persamaan penelitian terletak pada

⁴⁴ Anggraini, Santosa, and Citaningati, "Pengaruh Islamic Human Development Index , Pengangguran , Ketimpangan Pendapatan , Dan Upah Minimum Kabupaten Terhadap Kemiskinan (Studi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2009-2022)."

⁴⁵ MUNIR, "Pengaruh Islamic Human Development Index (I-Hdi) Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Dengan Pengangguran Sebagai Variabel Intervening." hal. 32

variabel dan metode uji analisis. Penelitian saya sama menggunakan variabel I-HDI dan Upah Minimum dalam mempengaruhi Tingkat Kemiskinan melalui variabel Pengangguran sebagai mediasi dan menggunakan metode uji analisis yang sama, yaitu uji *path analysis* dan uji Sobel dengan alat Eviews. Namun, perbedaan lokasi penelitian dan rentang tahun penelitian akan memastikan perbedaan hasil pengujian. Kondisi lokasi penelitian saya lebih mendukung teori, dan penambahan variabel ketimpangan pendapatan yang juga memiliki pengaruh terhadap kemiskinan secara teori lebih memperjauh perbedaan penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul “Analisis Pengangguran Sebagai Variabel Intervening Dalam Pengaruh Islamic Human Development Index (I-HDI), Upah Minimum, Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi persoalan persoalan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Kemiskinan

Badan Pusat Statistik mencatatkan bahwa tingkat persentase kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewaan Yogyakarta dalam periode tahun 2015-2024 menempati posisi tertinggi di pulau Jawa (tahun 2015 Jawa Tengah menempati posisi tertinggi dengan selisih tipis. Hal ini mengindikasikan permasalahan kemiskinan masih menjadi problematika serius di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Tingkat Pengangguran

Fluktuasi tingkat pengangguran di Provinsi Yogyakarta, berdasarkan data dari BPS sejalan dengan perubahan tingkat kemiskinan. Sehingga, dalam penelitian ini variabel pengangguran dianggap sebagai variabel penyebab tingginya kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

dan dengan cara memediasi variabel I-HDI, Upah Minimum, dan Rasio Gini.

3. *Islamic Human Development Index (I-HDI)*

Tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Yogyakarta pada rentang tahun 2010 hingga 2024 meraih level sangat tinggi. Hal ini tentu saja berbanding terbalik dengan teori yang menyatakan bahwa IPM mempengaruhi Kemiskinan, dimana apabila IPM suatu wilayah tinggi maka dapat menekan kemiskinan. Sehingga, dalam penelitian ini ingin menganalisis kembali tingkat IPM dengan menggunakan IPM berbasis syariah atau disebut dengan *Islamic Human Development Index (I-HDI)*. IPM yang distandarisi oleh UNDP dinilai kurang optimal apabila digunakan di wilayah dengan mayoritas muslim, maka konsep I-HDI sangat cocok digunakan untuk menganalisis tingkat sumber daya manusia dapat mempengaruhi kemiskinan di Provinsi DIY.

4. Upah Minimum

BPS mencatatkan bahwa upah minimum di Provinsi DIY termasuk kedalam wilayah dengan upah minimum terendah dalam periode tahun 2010-2024. Artinya upah minimum memiliki hubungan dengan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Provinsi DIY.

5. Rasio Gini

Ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY berdasarkan pada data dari BPS tercatat sebagai wilayah dengan ketimpangan pendapatan tertinggi dengan pendekatan rasio gini dalam rentang periode tahun 2010-2024. Ketimpangan pendapatan tersebut memiliki angka yang lebih tinggi daripada ketimpangan pendapatan nasional, sehingga dalam penelitian ini diartikan memiliki hubungan terhadap tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas bisa dikaji bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh langsung *Islamic Human Development Index* (I-HDI) terhadap Pengangguran?
2. Apakah terdapat pengaruh langsung Upah Minimum terhadap Pengangguran?
3. Apakah terdapat pengaruh langsung Ketimpangan Pendapatan terhadap Pengangguran?
4. Apakah terdapat pengaruh langsung *Islamic Human Development Index* (I-HDI) terhadap Kemiskinan?
5. Apakah terdapat pengaruh langsung Upah Minimum terhadap Kemiskinan?
6. Apakah terdapat pengaruh langsung Ketimpangan Pendapatan terhadap Kemiskinan?
7. Apakah terdapat pengaruh langsung Pengangguran terhadap Kemiskinan?
8. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung *Islamic Human Development Index* (I-HDI) melalui Pengangguran terhadap Kemiskinan?
9. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung Upah Minimum melalui Pengangguran terhadap Kemiskinan?
10. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung Ketimpangan Pendapatan terhadap Kemiskinan melalui Pengangguran?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah :

1. Menguji pengaruh langsung *Islamic Human Development Index* (I-HDI) terhadap Pengangguran
2. Menguji pengaruh langsung Upah Minimum terhadap Pengangguran

3. Menguji pengaruh langsung Ketimpangan Pendapatan terhadap Pengangguran
4. Menguji pengaruh langsung Islamic Human Development Index (I-HDI) terhadap Kemiskinan
5. Menguji pengaruh langsung Upah Minimum terhadap Kemiskinan
6. Menguji pengaruh langsung Ketimpangan Pendapatan terhadap Kemiskinan
7. Menguji pengaruh langsung Pengangguran terhadap Kemiskinan
8. Menguji pengaruh tidak langsung Islamic Human Development Index (I-HDI) melalui Pengangguran terhadap Kemiskinan?
9. Menguji pengaruh tidak langsung Upah Minimum melalui Pengangguran terhadap Kemiskinan
10. Menguji pengaruh tidak langsung Ketimpangan Pendapatan terhadap Kemiskinan melalui Pengangguran.

E. Ruang Lingkup Dan Batasan Masalah

Ruang lingkup dalam penelitian ini difokuskan kepada persentase tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010-2024 yang dipengaruhi oleh variabel bebas, yaitu *Islamic Human Development Index* (I-HDI), Upah Minimum, dan Gini Rasio. Variabel bebas tersebut dalam mempengaruhi variabel tingkat kemiskinan di Provinsi DIY diasumsikan melalui variabel mediasi berupa Tingkat Pengangguran.

Batasan masalah dalam penelitian ini dapat disebutkan, seperti keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Adapun keterbatasan penelitian yang mengarah dalam objek penelitian selain dari ketiga faktor tersebut adalah :

1. Penelitian terdahulu mengenai metode perhitungan variabel I-HDI terdapat perbedaan, sehingga dalam penelitian ini metode perhitungan I-

HDI berdasarkan pada teori dari Anto yang digunakan sebagian besar penelitian terdahulu.

2. Perhitungan IPM dalam I-HDI didasarkan pada metode baru yang digunakan BPS. Sebelumnya, IPM dihitung berdasarkan Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), dan Standar Hidup Layak(SHL) atau Pendapatan Perkapita. Namun, dalam penelitian ini mengacu metode baru BPS dengan mengganti AMH menjadi Rata Rata Lama Sekolah (RLS), dan Harapan Lama Sekolah (HLS), serta SHL diganti dengan Pengeluaran Perkapita Rumah Tangga.
3. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mencari pengaruh yang ditimbulkan dari variabel pengangguiran yang memediasi variabel I-HDI, Upah Minimum, dan Rasio Gini untuk mempengaruhi tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Periode data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan fokus penelitian, yaitu data dalam rentang tahun 2010 hingga 2024.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini dengan judul “*Analisis Pengangguiran Sebagai Variabel Intervening Dalam Pengaruh Islamic Human Development Index (I-HDI), Upah Minimum, Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*” adalah

1) Manfaat Teoritis

Hasil dari kepenulisan ilmiah penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca menambah wawasan dan pemahaman teoritis di bidang ekonomi pembangunan islam.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan bahan acuan dan bahan pertimbangan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran khususnya di wilayah Provinsi DIY Yogyakarta.

b) Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai bahan pengetahuan dan bahan acuan untuk dijadikan referensi tambahan dalam mengembangkan karya ilmiah. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan jangkauan wawasan, dan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi pembangunan islam dan kajian ekonomi makro.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari kepenulisan ilmiah penelitian ini dimaksudkan sebagai tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan bisa digunakan sebagai acuan topik sejenisnya khususnya mengenai ekonomi pembangunan islam. Penelitian juga dapat digunakan sebagai bahan perbaikan, perbandingan, ataupun penyempurnaan kekurangan yang ada dalam penelitian ini.

G. Penegasan Variabel

1) Penegasan Konseptual

- a) *Islamic Human Development Index* (I-HDI) merupakan alat ukur yang dirancang khusus untuk mengukur capaian pembangunan manusia dalam kerangka perspektif islam. I-HDI menilai tingkat kesejahteraan individu yang didasarkan pada pemenuhan kebutuhan dasar yang secara esensial bertujuan untuk merealisasikan kondisi di mana manusia dapat mencapai kebahagiaan total, baik di kehidupan dunia maupun akhirat.⁴⁶

⁴⁶ Haqiqi Rafsanjani, *Islamic Human Development Index in Indonesia* (Surabaya: UMS Surabaya Publhising, 2018).hal. 31

- b) Upah minimum didefinisikan sebagai jumlah imbalan moneter bulanan terendah yang wajib dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja. Komponen upah minimum mencakup upah pokok beserta tunjangan tetap. Penetapan besaran upah ini merupakan kewenangan kepala daerah dan memiliki fungsi esensial sebagai jaring pengaman sosial untuk menjamin agar pendapatan pekerja berada pada standar minimum yang layak.⁴⁷
- c) Rasio gini diartikan sebagai kondisi disparitas yang signifikan dalam tingkat kesejahteraan ekonomi dan akumulasi kekayaan di antara segmen populasi berpendapatan rendah (miskin) dan segmen populasi berpendapatan tinggi (kaya).⁴⁸
- d) Pengangguran merujuk pada populasi usia kerja yang tidak terlibat dalam kegiatan produksi, namun diklasifikasikan sebagai angkatan kerja. Kriteria yang mencakup definisi pengangguran meliputi individu yang secara aktif mencari pekerjaan, berada dalam tahap mencari pekerjaan, dan atau individu yang telah mencapai titik keputusan (*discouraged worker*) dan tidak lagi berupaya mencari pekerjaan.⁴⁹
- e) Kemiskinan merupakan kondisi multidimensional yang ditandai oleh defisit kapabilitas individu dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar (sandang, pangan, dan papan). Kemiskinan juga mencerminkan

⁴⁷ Oktavia, “Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Di Indonesia.” hal. 43

⁴⁸ Anggraini, Santosa, and Citaningati, “Pengaruh Islamic Human Development Index , Pengangguran , Ketimpangan Pendapatan , Dan Upah Minimum Kabupaten Terhadap Kemiskinan (Studi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2009-2022).”

⁴⁹ Luk Luk Annisatul Mufida and Muhammad Safar Nasir, “Analisis Dinamis Tingkat Pengangguran Di Indonesia,” *Journal of Macroeconomics and Social Development* 1, no. 1 (October 12, 2023): hal. 1–14, <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i1.15>.

kegagalan individu dalam melakukan usaha secara berkelanjutan untuk kualitas hidup yang lebih baik.⁵⁰

2) Operasional

a) Kemiskinan

Pengukuran tingkat kemiskinan dalam penelitian ini berdasarkan pada perhitungan persentase dari Badan Pusat Statistik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2010-2024. Sumber data diperoleh dari *website* asli Badan Pusat Statistik Provinsi DIY. Pengukuran kemiskinan oleh BPS berbeda dengan penetapan standar kemiskinan menurut UNDP, dimana BPS menggunakan Garis Kemiskinan untuk menentukan kategori masyarakat miskin. Garis Kemiskinan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$GK = GKM + GKNM$$

Keterangan :

GK : Garis Kemiskinan

GKM : Garis Kemiskinan Makanan (nilai pengeluaran kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari).

GKNM : Garis Kemiskinan Non-Makanan (Akses terhadap faktor faktor non-makanan, seperti pendidikan, kesehatan, dan hunian layak).

Selanjutnya setelah diketahui garis kemiskinan, maka dilakukan Sensus Penduduk untuk mengetahui besaran total penduduk miskin, dan dipersentasekan.

⁵⁰ A. Jajang, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021). hal. 65

b) Pengangguran

Tingkat pengangguran dalam penelitian ini diukur dari jumlah penduduk yang tidak memiliki, sedang mencari, atau tersedia pekerjaan dengan perbandingan jumlah angkatan kerja Provinsi DIY tahun 2010-2024. Sumber data dari *website* BPS Provinsi DIY. Rumus perhitungan tingkat pengangguran sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

c) *Islamic Human Development Index* (I-HDI)

Pengukuran I-HDI dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan indikator indikator *Maqasid Syariah*, seperti perlindungan agama (*Hifz ad-Din*), perlindungan jiwa (*Hifz an-Nafs*), perlindungan akal (*Hifz al-'Aql*), perlindungan keturunan (*Hifz an-Nasi*), dan perlindungan harta (*Hifz al-Māl*). Indikator indikator tersebut diwakili oleh variabel makroekonomi seperti dalam tabel berikut:

Tabel 1.10 Komponen I-HDI

No.	Dimensi	Indikator Pembangunan yang Mewakili
1	Agama (<i>dien</i>)	Indeks Kriminalitas (<i>crime index</i>)
2	Keturunan dan Keluarga (<i>nasl</i>)	Laju Pertumbuhan Penduduk
3	Harta Material (<i>maal</i>)	Angka Kedalaman Kemiskinan, dan Pengeluaran Perkapita
4	Kepintaran (<i>'aql</i>)	Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata Rata Lama Sekolah
5	Jiwa (<i>nafs</i>)	Tingkat Harapan Hidup (<i>life expetancy index</i>)

Sumber : Hendrie Anto, 2009

Selanjutnya, data disesuaikan dengan indikator pembangunan tersebut, serta data yang diambil bersumber dari BPS Provinsi DIY, dan Bapperida Provinsi DIY. Persamaan pengukuran I-HDI yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$IHDI = \left[\left(\frac{2}{5} ID \right) + \frac{1}{5} (INF + IA + INS + IM) \right] \times 100\%$$

Keterangan

IHDI	: <i>Islamic Human Development Index</i>
ID	: Indeks <i>ad-dien</i>
INF	: Indeks <i>an-Nasl</i>
IA	: Indeks <i>an-‘aql</i>
INS	: Indeks <i>an-Nafs</i>
IM	: Indeks <i>an-Maal</i>

d) Upah Minimum

Upah minimum dalam penelitian ini berdasarkan pada ketetapan dari gubernur Provinsi DIY tahun 2010-2024. Sumber data berasal dari BPS, dan ketetapan gubernur terkait upah minimum daerah. Rumus perhitungan Upah Minimum menurut PP 36/2021 dapat diketahui sebagai berikut:

$$UMn = UMt + \{UMt \times (\text{inflasi} + \text{persentase } \Delta PDBt)\}$$

Keterangan :

Umn : Upah minimum yang akan ditetapkan

UMt : Upah minimum tahun berjalan

Inflasi : Inflasi dihitung dari bulan September tahun lalu hingga September tahun berjalan

$\% \Delta PDB_t$: Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan PDB yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I serta kuartal II tahun berjalan.

e) Rasio Gini

Rasio gini merupakan skala pengukuran ketimpangan pendapatan dalam penelitian ini dengan khususnya di Provinsi DIY tahun 2010-2024. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik, dimana rumus pengukurannya adalah :

$$GR = \sum_{t=1}^n \{f p_t (F c_t + F c_{t-1})\}$$

Keterangan :

GR : Gini Ratio

$F p_t$: Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

$F c_t$: Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

$F c_{t-1}$: Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke i-1

Secara operasional penelitian yang berjudul “*Analisis Pengangguran Sebagai Variabel Intervening Dalam Pengaruh Islamic Human Development Index (I-HDI), Upah Minimum, Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*” bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari tiga faktor yang terdiri dari Islamic Human Development Index (I-HDI), Ketimpangan Pendapatan, dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan dengan melalui Pengangguran sebagai variabel intervening.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sebagai gambaran secara konstruktif mengenai isi setiap bab skripsi dan mengetahui pembahasan pada setiap bagian skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berfungsi sebagai pendahuluan yang menguraikan kerangka penelitian. Pada bagian ini, dijelaskan secara rinci tentang latar belakang masalah yang mendorong pemilihan topik, diikuti dengan penentuan rumusan masalah penelitian yang menjadi yang akan menjadi inti pembahasan. Bagian ini juga merumuskan tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang diharapkan. Selanjutnya, dijelaskan ruang lingkup dan batasan penelitian untuk memperjelas cakupan studi, dan diakhiri dengan penegasan istilah untuk menghindari ambiguitas serta sistematika penulisan yang memperjelas struktur penelitian.

Bab II Landasan Teori

Bab ini membahas tentang konsep yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berisikan teori. Teori teori yang membahas variabel/sub variabel pertama, teori yang membahas variabel/sub variabel kedua, dan seterusnya. Kajian penelitian terdahulu, kerangka teori, dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, Variabel dan pengukuran, populasi, sampling dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian

Bab ini memuat hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data, dan pengujian hipotesis menggunakan alat penelitian.

Bab V Pembahasan

Bab ini menyajikan sebuah hubungan antara posisi temuan penelitian atau teori yang ditemukan terhadap teori yang sudah ada sebelumnya. Pada bagian ini juga memuat hasil penelitian yang telah diolah dan dianalisis.

Bab VI Penutup

Dalam bab ini dijelaskan kesimpulan dari hasil pembahasan dan menjelaskan capaian dari fokus penelitian, serta memberikan saran berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan